

KH. Yusuf Muhammad:

DEMOKRATISASI, ITU PROSES TERBAIK...

Sejak beberapa dekade yang lalu setidaknya hingga tahun 80-an, umat Islam dikategorikan dalam kelompok ekstrim kanan. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan negara. Pendapat Anda bagaimana?

Sebetulnya untuk menyebut umat Islam secara keseluruhan sebagai kelompok ekstrim kanan juga patut dipertanyakan. Apakah memang umat Islam secara keseluruhan bersama-sama berada di dalam satu kelompok yang kemudian disebut ekstrim kanan. Bahwa di dalam proses pembangunan dan pembentukan bangsa ini terjadi tarik menarik bahkan kemudian ada semangat untuk memperjuangkan warna Islam yang kental, yang itu diawali dari Konstituante dan kemudian diwakili secara menyolok oleh kelompok intelektual yang bergabung dalam partai Masyumi, memang itu sebuah realitas politik, suatu kenyataan dan saya pikir hal itu adalah sesuatu yang sah. Tapi yang patut dicatat bahwa sebetulnya, sejak awal, pretensi perjuangan kelompok-kelompok Islam di Indonesia memang berbeda-beda. Katakanlah kalau itu ditarik kelompok Masyumi dan kelompok Nahdlatul Ulama, sejak awal mereka memiliki *approach* yang berbeda. Karena pendekatan Masyumi



mungkin, -memakai bahasa sekarang- sangat struktural, sementara Nahdlatul Ulama lebih bersifat kultural. Sehingga di dalam proses politik Nahdlatul Ulama lebih "luwes". Dan keluwesannya ini sebetulnya merupakan implementasi dari sikap politiknya. Dan sikap politik ini sebetulnya berangkat dari khazanah keilmuan keagamaan yang terus terang lebih luas

dimiliki oleh NU *ketimbang* dimiliki oleh orang-orang Masyumi. Mereka memiliki beberapa *aqwal* (pendapat) di dalam masalah-masalah hukum maupun masalah-masalah kemasyarakatan. Mereka memiliki kaidah-kaidah yang sangat fleksibel. Sehingga ada perbedaan *performance*. Karena itu saya masih mempertanyakan tentang penyebutan bahwa umat Islam secara keseluruhan, tanpa klasifikasi disebut kelompok ekstrim kanan. Bukan karena saya orang NU, tapi sikap politik orang

NU sejak dulu sampai sekarang masih tetap konsisten. Begitulah mereka selalu bersikap karena mereka memiliki sebuah faham keagamaan yang memang sangat lentur. Bahkan kadang-kadang lalu *kelenturen*. Nah ini juga yang perlu diberikan perhatian. Sehingga mungkin karena yang menonjol itu kelompok-kelompok yang radikal dan mereka memiliki orang-orang yang memang berperan, karena faktor intelektualitasnya atau karena peran sosio-

politiknya, maka lalu ummat Islam secara keseluruhan dianggap sebagai ekstrim kanan. Tapi saya tidak sependapat kalau itu digeneralisir.

Setelah tahun 80-an hingga sekarang, terlihat terjadi perubahan dengan adanya apa yang disebut “politik akomodasi Islam” yakni diterimanya unsur Islam dalam perpolitikan Orde Baru. Menurut Anda?

Terjadinya perubahan-perubahan itu saya kira tidak lepas dari sebuah kesadaran terhadap realitas. Bahwa ternyata untuk melakukan keterlibatan di dalam berbangsa dan bernegara, tidak bisa tidak orang harus menerima kenyataan-kenyataan perbedaan. Orang kemudian mau mencoba mengurangi tuntutan-tuntutannya, atau mungkin mereka sedang menyembunyikannya. Ketika mereka menganggap gagal dengan pendekatan-pendekatan radikal seperti yang telah mereka lakukan, maka kemudian mereka melakukan perubahan pendekatan. Tapi saya tidak yakin bahwa pada prinsipnya mereka berubah. Karena itu kelompok ini sebetulnya masih tetap patut “dicurigai”. Dan mereka ini kebetulan kemudian lebih beruntung di dalam proses rekrutmen politik dan rekrutmen sumber daya manusia, mereka lebih beruntung masuk di dalam lingkaran kekuasaan. Sehingga ini mungkin yang kemudian dibaca bahwa telah terjadi sebuah perubahan. Menurut saya, untuk Nahdlatul Ulama dan kalangan yang berfaham seperti Nahdlatul Ulama, di dalam sikap sosial-politikanya tidak terjadi perubahan yang menyolok.

Jadi kecenderungan ideologis-teologis yang masih menyembunyikan agenda eksklusif negara Islam masih kuat di Indonesia?

Masih.

Sejauh mana pengaruh “tafsir baru” Islam tentang negara -yang tampil lebih toleran, tidak terlalu mengutamakan bentuk tetapi

substansi-, terhadap kelompok yang masih menyimpan agenda eksklusif negara Islam ?

Sebetulnya, seperti yang tadi saya katakan bahwa tafsir baru itu kan yang selama ini diikuti dan dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, kelompok Sunni. Di mana kelompok Sunni itu lebih melihat kepada masalah-masalah substansial. Bukan masalah-masalah bungkus. Sehingga kalau kita lihat tujuan dari gerakan-gerakan kelompok Sunni adalah terlaksananya syariat Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan terbentuknya sebuah struktur kekuatan dan kekuasaan politik Islam. Bukan itu yang menonjol. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi bukan itu yang menonjol. Jadi pendekatan substansial, pembinaan masyarakat dan terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan, itulah yang kemudian berkembang. Jadi saya kira itu bukan tafsir baru. Itu sebuah kecenderungan lama yang mungkin ditake over “wajah-wajah baru” dengan “wajah baru”. Sebetulnya itu yang sejak lama dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Mari kita lihat orang-orang Nahdlatul Ulama menyelesaikan persoalan; apakah penguasa negeri ini Islam atau tidak. Memenuhi syarat Islam atau tidak. Jawaban para ulama NU jelas sekali bahwa penguasa sekarang ini adalah *waliyyul amri adldlaruri bisysyaukah*. Mereka adalah pemegang kekuasaan karena memang mereka secara nyata memiliki kekuasaan. Jadi mereka kita terima sebagai sebuah alternatif ketika kita tidak bisa mendapatkan yang maksimal. Ini kan luwes sekali. Jawaban seperti itu luwes sekali.

Prinsip seperti itu apakah masih dipegang teguh kalangan NU sampai sekarang?

Masih. Kenapa saya katakan masih, selama mereka masih berpedoman kepada khazanah-khazanah lama, kepada kerangka pemahaman keagamaan seperti selama ini diikuti, saya kira tidak akan berubah. Karena sebetulnya itu muncul dari kekayaan khazanah keagamaan, pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh NU. Bahkan ada kritik yang sekarang sedang terjadi di

kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama bahwa sebetulnya sekarang sikap politik Sunni patut dipertanyakan di mana sering kali ketika terjadi kontroversi atau benturan antara penguasa dan rakyat, ternyata seolah-olah pandangan politik Sunni cenderung membela penguasa. Tidak berfihak kepada rakyat. Hal itu sekarang sedang digugat. Sikap politik seperti itulah yang saya katakan *kelenturen*. Karena memang terlalu kaya dengan dasar-dasar pemahaman dan pandangan-pandangan keagamaan seperti yang diajarkan di dalam khazanah-khazanah keilmuan Sunni.

Anda katakan ada kecenderungan *kelenturen* itu. Apakah disebabkan karena terlalu kayanya khazanah atau terlalu sederhananya konsep-konsep dari khazanah keilmuan?

Bisa kedua-duanya. Tetapi saya kira itu lebih bersifat faktor manusianya. Artinya, ketika mereka terdesak oleh sesuatu, lalu mereka mencari legitimasi dari pendapat-pendapat yang sebetulnya *marjub* artinya tidak dipilih,

tetapi pendapat-pendapat itu diangkat. Karena itu lalu kita punya pikiran perlu ada bingkai yang dimiliki oleh ummat Islam atau oleh kalangan Sunni. Bingkai di mana mereka boleh bergerak ke mana saja, tetapi masih dalam batas itu. Karena bingkai ini tidak dimiliki, maka tingkat kelenturannya kadang-kadang keluar pagar. Ya memang mereka bisa mencari legitimasi dari khazanah keilmuannya. Misalnya orang mengatakan *idza dlaqal amru ittasa'*, apabila keadaan menyempit maka hukum menjadi longgar. Tapi penerapan kaidah seperti itu tidak bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Kaidah-kaidah seperti itu harus tetap diberi bingkai. Harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip menegakkan keadilan, prinsip *qulil haqqa walau*

kana murrana (suarakanlah kebenaran meskipun pahit, red.) dan prinsip-prinsip yang lain. Jadi kaidah-kaidah itu jangan berdiri sendiri lalu digunakan untuk mengambil keputusan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi saya kira apa yang sebetulnya menjadi pandangan-pandangan politik kalangan Sunni (Nahdlatul Ulama) itulah yang sekarang berkembang dan *ditake over* oleh banyak orang.

Anda mengatakan kedekatan itu masih belum pada taraf substansi, artinya belum ada "tafsiran baru" yang kemudian menyebabkan mereka secara teologis rukun dengan negara. Jadi semata-mata hanya setrategi saja. Lalu target politik apa yang mungkin mereka dapatkan dengan melakukan strategi seperti itu?

.. tujuan dari gerakan-gerakan kelompok Sunni adalah terlaksananya syariat Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan terbentuknya sebuah struktur kekuatan dan kekuasaan politik Islam.

Sebetulnya kalau sekarang dilakukan upaya melakukan pendekatan, pertama saya kira itu belajar dari sejarah. Bahwa pendekatan-pendekatan yang radikal dan *all or nothing* (sempurna atau tidak sama

sekali, red.) itu dalam sejarah gagal. Karena itu berarti kita sudah tidak bisa berfikir *all or nothing* lagi. Nah cara berfikir tidak *all or nothing* ini yang sekarang mewarnai sikap politik para pemuka NU. Itu kaidahnya jelas sekali, *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*, sesuatu yang tidak kita dapatkan semua, jangan kita tinggalkan semuanya. Kita bisa melihat bagaimana sikap KH. Wahab Hasbullah di dalam perjalanan politik Indonesia. Di situ terlihat sekali kehebatan beliau dalam menerapkan pandangan-pandangan seperti itu. Nah karenanya saya yakin, pertama, karena pengalaman sejarah, yang kedua, kita mengambil bagian di dalam proses itu jauh lebih baik dari pada tidak sama sekali. Sekarang tinggal sejarah yang menguji. Apakah ijtihad politik ini juga akan sampai kepada apa yang diharapkan atau

tidak. Apakah lalu justru kita makin banyak berkorban dan meninggalkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip syariat atau kita makin menerapkannya. Itu yang akan diuji oleh sejarah. Dan soal dekat tidaknya ummat Islam dengan pemerintah tidak bisa diukur dengan suasana yang selama ini disebut dengan "ijo royo-royo" itu. Saya belum sependapat bahwa itu sudah sampai kepada makna kedekatan. Karena kedekatan struktural atau kedekatan sekelompok orang dengan pemerintah yang kemudian mereka mengklaim representasi ummat Islam sebetulnya tidak juga bisa dijadikan ukuran. Di samping ternyata kelompok-kelompok Islam yang banyak dan plural itu tidak sepenuhnya terwakili, rupanya penafsiran tentang "dekat" ternyata juga terjadi kesalahan.

Maksud Anda?

Ada seorang tokoh atau ulama mungkin karena hubungannya baik dengan bupati, sering ketemu, sering didatangi, lalu dianggap berarti bupati telah dekat dengan ummat Islam. Tidak.

Kedekatannya bukan pada seringnya mereka bertemu. Tapi pada apakah komitmen yang menjadi kemauan ummat, yang bersumber dari nilai-nilai ajaran itu yang juga menjadi komitmen dan perilaku penguasa. Itu sebetulnya yang mendasar. Ketika komitmen nilai ini tidak ketemu, tapi cuma ketemu dalam sebuah slogan, dalam seremoni, dalam basa basi, saya kira kita *ndak* boleh mengatakan sudah dekat. Dan kenyataannya, kalau saya boleh mengatakan, kedekatan-kedekatan yang terjadi sekarang itu cuma struktural, seremonial dan minta maaf kalau saya katakan lebih bersifat basa-basi politik. Mungkin dari sana diharapkan proses pendekatan substansi bisa dilakukan. Ya, itu masih merupakan harapan dan sejarah yang akan menguji.

kedekatan-kedekatan yang terjadi sekarang itu cuma struktural, seremonial dan minta maaf kalau saya katakan lebih bersifat basa-basi politik. Mungkin dari sana diharapkan proses pendekatan substansi bisa dilakukan.

Sejauh mana proses ikut mengambil bagian dalam proses politik kenegaraan Orde Baru ini telah menunjukkan hasil?

Saya kira, sesuatu yang harus kita selesaikan dulu, yang harus kita perjelas lebih dulu, ummat Islam itu sebetulnya siapa? Kalau kita melihat dan menafsiri yang namanya ummat Islam itu adalah orang yang beragama Islam, ya sudah banyak dan besar sekali. Kalau jawabannya seperti itu. Kalau orang-perorang.

Kalau jawabannya bukan orang-perorang?

Kalau masalahnya komitmen, nanti dulu. Kan aneh bahwa negara yang dikuasai, diatur dan didukung secara beramai-ramai oleh orang yang disebut sebagai ummat Islam itu tadi justru di

negara itu korupsi menjadi problem yang terbesar. Kan ironis sekali. Jadi pengertian ummat harus direvisi. Kalau ummat itu dalam arti yaitu semua orang Islam, jelas sudah. Tapi ummat dalam arti komitmen saya kira belum.

Apa dengan demikian strategi struktural yang ditempuh sebagian dari golongan ummat Islam itu harus ditinjau kembali?

Harus disempurnakan. Dan penyempurnaannya harus ada proses pemekaran rekrutmen. Mereka yang selama ini berada dalam kekuasaan yang mengklaim atau menganggap mereka sudah representasi dari ummat, jangan merasa sudah selesai. Harus terjadi proses rekrutmen sehingga semakin banyak kelompok ummat yang bisa ditarik. Dan mereka bukan sekedar orang yang beragama Islam tapi yang punya komitmen kepada Islam. Itu baru akan terjadi sesuatu yang kita harapkan. Contoh kasus, tentang Undang-Undang Peradilan Anak. Orang-orang



Departemen Kehakiman yang mengajukan, yang membahas Undang-Undang itu kan orang-orang Islam. Tapi materi Undang-Undang tersebut sebelum mendapatkan masukan, kritik dari berbagai fihak kan belum memuat apa yang menjadi aspirasi dari ajaran Islam. Depag yang dianggap sebagai lembaga yang paling Islami patut disayangkan seringkali justru tidak menggambarkan dan mempresentasikan ahlak-ahlak Islam. Jadi saya kira belum selesai persoalannya. Kedekatan itu masih formalitas, seremonial dan basa-basi politik. Tapi kalau kita berfikir *wis timbang gak babar pisan* (sudahlah dari pada tidak sama sekali, red.), barangkali kita tidak bisa berharap banyak dari situ. Memang kalau kita lihat dari segi semangat keislaman, secara umum meningkat. Sekarang ummat Islam menjadi cair. Tidak ada lagi klasifikasi kelompok-kelompok yang sering disebut abangan atau tidak abangan. Semangat orang menunaikan ibadah haji, semangat orang berpuasa, ya, alhamdulillah. Tapi kita juga berbicara tentang sesuatu yang substansial, yang lebih dari itu. Kita ingin berbicara tentang nilai-nilai universal yang ditawarkan oleh Islam seperti kebenaran, keadilan dan kejujuran. Apa itu kita dapatkan dari situasi tersebut?

Agenda yang sementara ini masih dipendam oleh kalangan tertentu yakni kesadaran ideologis berdirinya negara Islam secara nominal, letaknya ada di mana dalam konstelasi pemikiran Islam; dan masa depannya bagaimana?

Saya kira memang sulit memprediksi, tapi saya yakin bahwa semangat itu sebagai semangat yang bersifat ideologis tidak mudah cair. Jadi itu akan tetap menjadi semangat yang tersembunyi atau berada di balik langkah-langkah yang dilakukan. Memang mungkin terjadi degradasi. Artinya terjadi penurunan dari kuantitas orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran seperti itu. Tapi mereka atau sebagian, saya yakin masih tetap berpikiran demikian. Dan kalau itu dipertanyakan apa boleh apa tidak, saya kira kan boleh-boleh saja. Orang punya keinginan seperti itu boleh-boleh saja. Maksud saya, keinginan itu akan bertarung dengan keinginan-keinginan yang lain dalam proses perkembangan bangsa ini. Bahwa kemudian Kiai Ahmad Siddiq mengatakan sudah final, itu dalam pandangan dan kaca mata beliau. Artinya faham yang diikuti beliau dengan melihat realitas bahwa bentuk negara yang ada sekarang ini sudah final. Sekarang persoalannya tinggal bagaimana mengisi dan mewarnai. Dan saya kira itu yang dimaksud oleh statemen beliau. Pengertian bagaimana kita mewarnai dan bagaimana kita mempengaruhi proses perkembangan ini, ini yang sebetulnya harus didefinisikan, harus diuraikan, harus dikerangkakan, harus dijabarkan sedemikian rupa oleh ummat Islam. Jadi, degradasi memang telah terjadi tetapi kecenderungan itu tidak akan pernah hilang.

Saya melihat agenda tersebut masih sangat kuat diperjuangkan oleh beberapa kelompok mahasiswa yang mendapatkan pengaruh dari gerakan Ihwanulmuslimin di Mesir....

Cuma sayang teman-teman yang menyatakan diri sebagai kekuatan-kekuatan seperti itu mereka

juga sebetulnya lebih didominasi oleh semangat dari pada mereka memiliki konsep untuk cita-citanya itu. Sehingga tidak bermaksud menyatakan tidak realistis, tetapi itu seperti orang teriak di padang pasir saja. Ini perlu mereka sadari bahwa apa yang mereka inginkan itu tidak bisa dilakukan seperti orang membalik tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka jangan menganggap bahwa dengan berbuat sendiri mereka bisa melakukan itu. Itu *impossible*. Jauh panggang dari api. Karena itu saya kira sebaiknya ummat Islam, kelompok-kelompok Islam dengan plus-minusnya, harus bersama-sama. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya mereka harus bekerja sama. Dan yang bersifat struktural dan yang bersifat formalitas itu akan memberi arti kalau terjadi pemekaran rekrutmen. Kalau tidak gombal.

Apakah fenomena gejolak sosial yang terjadi punya kaitan langsung dengan bentuk hubungan Ummat Islam dan Negara yang belum menyentuh substansi atau baru -dalam bahasa Anda- formalitas politik itu?

Kasus-kasus yang terjadi, sebagai kejadian-kejadian di masyarakat saya kira faktornya memang banyak. Tapi yang sering disimpulkan oleh para ahli dan saya kira benar, itu merupakan akumulasi dari terjadinya krisis keteladanan. Krisis keteladanan ini menjengkelkan. Karena kita terus terang mengalami krisis. Sehingga untuk mencari pemimpin, pejabat yang bisa diteladani memang jarang sekali. Kesal mereka mendengar omongan-omongan yang tidak cocok dengan kenyataan. Jadi krisis keteladanan ini problem sosial-politik yang serius. Karena itu lalu terjadi kemarahan. Yang kedua, berkaitan dengan krisis keteladanan itu terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan ini baik yang sifatnya nilai, dan ini yang saya kira besar pengaruhnya: adanya ketidakadilan, adanya keberfihakan kepada sekelompok tertentu, apakah itu menyangkut soal ekonomi, soal politik, hukum maupun penyimpangan-penyimpangan yang bersifat materi: ada korupsi, ada kolusi dan sebagainya. Kita saksikan bukan?

Yang mendapatkan dukungan yang kemudian berkembang secara ekonomi itu siapa? Dana yang sedemikian besar ternyata dimanfaatkan oleh siapa? Apakah yang selama ini kita dengar adanya upaya-upaya mengangkat kelas bawah itu memang benar-benar terjadi atau sebetulnya itu sekedar slogan politik? Atau memang terjadi tapi dalam skala yang kecil namun ditampilkan secara besar-besaran? Belum lagi kemudian soal politik, ketidakadilan di dalam politik, kemunafikan di dalam politik. Dengan ini saya kira tidak bisa tidak orang harus menyatakan ketidakpuasannya. Ketika ketidakpuasan itu juga tidak bisa dinyatakan maka menjadi tindakan. Jadi kalau saya boleh mengatakan, sebetulnya brutalitas yang ada di dalam masyarakat itu sebetulnya merupakan potret dari brutalitas yang ada dalam struktur. Jangan disalahkan kalau mereka brutal. Mereka memang menyaksikan bagaimana sekelompok orang menghabiskan uang negara dengan seenaknya. Bagaimana mereka menyaksikan hanya kelompok kecil saja yang mendapatkan fasilitas. Kapan mereka yang di bawah terangkat kalau ternyata fasilitas hanya dinikmati oleh lingkaran-lingkaran tertentu saja. Nah kejengkelan-kejengkelan ini lalu menggumpal di dalam dada orang-orang itu. Ada yang bisa *ngempet* (menahan, red.), ada yang tidak. Ada yang *wis lah opo jare Pengeran wis kito pasrabke wae mbesuk sik ono pengadilan* (sudahlah terserah apa kehendak Tuhan kita pasrahkan saja nanti masih ada pengadilan, red.). *Wong Pengeran ora sare* (Tuhan tidak tidur, red.). *Wong pancen ndonyo iku yo isine pancen ngono iku* (memang dunia isinya seperti itu). Untung kalau kita mendapatkan sekelompok yang begini ini. Dan untung kalau para kiainya punya pendapat seperti ini. Sekarang ternyata sebagian yang lain merasa tidak cukup dengan itu. Baik, memang ini merupakan suatu ujian dari Tuhan, ini memang bagian sah dari kehidupan, tapi kita kan diharuskan untuk bersikap amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar terjadi aksiden, terjadi penampilan-penampilan yang *over dosis* saya kira itu resiko yang wajar-wajar saja.

Jadi menurut Anda kerusuhan itu termotifasi juga oleh semangat keagamaan amar ma'ruf nahi munkar itu?

Iya.

Indikasinya apa, sebab ini diragukan oleh banyak orang?

Saya kira soal bahwa semangat amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi faktor yang ikut mempengaruhi itu, iya. Hanya sekarang tinggal mana yang dominan di dalam proses terbentuknya kemarahan. Itu juga banyak faktor. Kita tinggal mengamati kasusnya saja. Di mana kejengkelan-kejengkelan itu terjadi. Belum lagi benturan-benturan antar agama. Yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana pemuka-pemuka masyarakat memberikan sebuah rumusan yang cantik tentang persoalan itu dengan pandangan-pandangan keagamaan. Bagaimana bingkai amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah kita. Karena masing-masing orang punya interpretasi yang berbeda-beda tentang itu. Kita bisa memberikan ilustrasi yang bermacam-macam tentang itu.

Sejauh mana ketidakpuasan masyarakat -yang mayoritas umat Islam- terhadap negara akan mempengaruhi legitimasi rakyat terhadap keberadaan negara yang nota bene adalah negara Pancasila, bukan negara Islam?

Dalam posisi pemerintah yang terlalu kuat dan masyarakat terlalu lemah seperti sekarang ini, saya kira memang mereka akan realistis. Sekalipun mungkin pengertian realistis itu mungkin harus diterjemahkan dengan kalimat *kepekso* (terpaksa, red.). Mereka akan tetap mendukung dan akan tetap menyatakan kesetiannya terhadap kekuasaan dan penguasa yang ada.

Karena tidak puas dengan bentuk negara yang ada apakah kemudian lahir suatu keinginan untuk mencari alternatif bentuk negara yang baru?

Tidak. Kalau di kalangan masyarakat luas, di kalangan mayoritas umat Islam saya kira mereka tidak berfikir untuk mencari bentuk negara yang baru. Mereka berfikir justru bahwa yang terjadi ini adalah kesalahan manusianya. Coba sekarang kita lihat kurang apa aturan negara kita bagusnya. Pancasila, UUD 45, sesudah itu GBHN, asas pembangunan. Kurang apa? Komprehensif sekali sampai *kekomprehensipen, over komprehensif* di dalam teorinya, *sangking kepingine* (karena terlalu inginnya, red.) kelihatan komperhensif. Sehingga ketika kita melakukan seminar tentang *fikih*

siyasah, saya mengisi dengan Pak Soetandyo (Prof. Soetandyo Wignyosoebroto), hasil seminar para kiai itu ternyata ahirnya memang soal pelaksana dan pelaksanaan. *Soal the singer not the song*. Sehingga karena itu kita bisa mengatakan bahwa problem bentuk negara itu tidak sangat dominan. Jadi

justru yang meresahkan dan menjadi problem mereka ialah bagaimana aturan yang ada dan penguasa yang ada, bisa sesuai dengan apa yang kita sepakati sebagai prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Sudah sangat bagus kok.

Di dalam mensikapi penyelewengan dari sisi tindakan orang-perorang, ada beberapa kelompok muslim yang mencoba melakukan upaya pembenahan melalui gerbong demokratisasi. Tetapi di satu sisi gerakan demokratisasi itu kan ternyata selalu berhadapan dengan kekuatan negara. Menurut Anda bagaimana?

Isu demokratisasi itu sendiri masih perlu kita

Saya kira soal bahwa semangat amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi faktor yang ikut mempengaruhi itu, iya. Hanya sekarang tinggal mana yang dominan di dalam proses terbentuknya kemarahan.

cernakan, kita selesaikan. Pengertian negara demokratis itu bagaimana. Sehingga di dalam satu diskusi, pernah ada seorang kiai yang mengatakan kenapa kita kok tidak berusaha mengupayakan negara yang baik. Negara yang baik. Karena demokrasi itu bukan tidak berpenyakit. Maksud saya demokrasi bukan segala-galanya. Bahkan kalau kita kaji teori demokrasi sejak awalnya, demokrasi yang asli demokrasi yang awal itu bukan seperti yang kita kenal sekarang ini. Demokrasi, karena sudah *kadung* (terlanjur, red.) dianggap bagus lalu ditempel-tempeli yang bagus-bagus. Sehingga dalam gambaran akhirnya demokrasi itu merupakan sesuatu yang bagus. Tapi sebetulnya isu demokratisasi, pengertiannya secara lebih luas lagi masih berada dalam kontroversi. Itu sebabnya, ada yang mempertanyakan kenapa kita tidak pakai kalimat *baladun thayyibatun*, negara yang baik.

Tapi kalau upaya demokratisasi itu wujudnya adalah perbaikan sistem yang ada?

Nah karena itu kita melihat demokratisasi itu sebuah langkah, sebuah proses yang terbaik di antara sekian pilihan-pilihan yang ada. Itu maksud saya. Saya akan mengatakan begitu. Di mana proses demokratisasi ini akan membantu harapan-harapan kita akan nilai-nilai universal yang akan kita kembangkan. Jadi dalam pengertian itu saya kira demokratisasi sangat perlu mendapatkan dukungan. Bagaimana orang haknya dihormati, bagaimana orang memiliki martabat yang terhormat. Karena kalau kita lihat substansi dari negara yang dikehendaki oleh Islam adalah adanya kesamaan, egalitarianisme. Sehingga yang ditawarkan dan yang disodorkan oleh ajaran Islam, pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu memang tidak terjadi ketika manusianya masih tidak memiliki pengakuan terhadap asas kesetaraan. *Ndak* bisa. Ketika orang menganggap bahwa dia lebih dari orang lain, ketika sekelompok orang masih menganggap lebih dari yang lain jangan berharap bahwa keadilan akan terjadi. Saya menganggap bahwa proses demokratisasi adalah dalam rangka

itu tadi. Lalu yang kedua, prinsip *asyyura*, prinsip permusyawaratan. Permusyawaratan tidak akan pernah terwujud dengan baik kecuali kalau kita memiliki penghormatan terhadap hak manusia-manusia yang ada di negeri itu. Dan yang ketiga, *Al-musawah bainannas amamal hukm*, persamaan manusia di hadapan hukum. Tiga prinsip dasar ini, akan terdukung dan akan dapat terangkat melalui proses demokratisasi. Sekalipun demokratisasi bukan segala-galanya. Jadi, itu kita ambil sebagai alternatif sebagai sarana untuk menuju kepada apa yang kita cita-citakan. Sebab jika kita bicara tentang demokrasi representasi, jika kita berbicara tentang *one man one vote*, di situ akan ada persoalan. Karena, apakah memang semua orang yang berbeda kemampuannya, berbeda pemahamannya lalu diberi wewenang akan hak yang sama. Tidak bisa.

Itu berlawanan dengan konsep keadilan itu sendiri....

Berlawanan dengan konsep keadilan itu. Tetapi karena kita belum menemukan rumusan yang lain maka demokratisasi yang dijadikan alternatif sarana, itu kita terima. Dan itu saya kira akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan, yakni terwujudnya prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Islam dalam proses pengembangan bangsa dan negara.

Ada sekelompok ummat Islam yang berpendapat bahwa karena ummat Islam sekarang ini dekat dengan negara yang oleh anda dikatakan kedekatan formalitas politik itu, maka kita harus menunda dulu agenda demokratisasi itu. Jika kita harus memilih demokratisasi atau kedekatan semacam itu komentar Anda bagaimana?

Kita jangan dipaksa untuk memilih hanya dua itu.

Pilihan lainnya apa?

Ya, kedua-duanya berjalan. Proses demokratisasi tetap berjalan tanpa mengganggu kedekatan. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak mempunyai

alternatif itu? Apakah kalau kita memperjuangkan demokratisasi itu artinya kita lalu jauh? Apa mesti begitu jawabnya? Tidak toh? Kalau memang tidak begitu mengapa kita tidak kedua-duanya? Idealnya kan begitu.

Dalam praktek antara kedekatan dan demokratisasi itu memang saling menegasikan. Ini bagaimana?

Kalau kedekatan itu kedekatan yang substansial saya kira tidak akan saling menegasikan. Tapi karena kedekatan itu bersifat seremonial, bersifat performa, formalitas politik, maka akan saling benturan. Sehingga kalau bentuknya cuma begitu lalu nilai-nilai yang universal dikorbankan, maka saya kira itu pilihan politik yang tidak Islami juga. Karena tugas kedekatan itu mengupayakan bagaimana agar terjadi kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, musyawarah dan persamaan di depan hukum. Lha kalau kita dekat kemudian kita melegitimasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal itu, untuk apa dekat?

Jalan tengah yang Anda tawarkan tadi, apakah bisa dielaborasi lebih jauh?

Saya kira kedekatan itu harus ditindaklanjuti dengan melakukan *understanding* lebih jauh. Jadi kedekatan itu jangan dijadikan tujuan. Kedekatan adalah sarana untuk agar kita bisa menawarkan dan mengembangkan nilai-nilai yang menjadi amanah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita supaya bangsa ini awet. Kita jangan berobsesi bahwa negara ini akan ada selamanya. Sejarah menunjukkan ummat-ummat, kaum-kaum yang dulu kemudian ternyata hilang dari peredaran

Karena tugas kedekatan itu mengupayakan bagaimana agar terjadi kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, musyawarah dan persamaan di depan hukum. Lha kalau kita dekat kemudian kita melegitimasi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal itu, untuk apa dekat?

sejarah. Saya sering mengatakan bahwa jangan dikira Indonesia ini akan ada selamanya. Ada *sunnatullah*, ada ketetapan Allah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an; kehancuran sebuah bangsa atau sebuah suku akan terjadi apabila ada hal-hal yang mestinya dihindari tapi dilakukan. Qur'an saya kira cukup mengisyaratkan *wadlaraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan muthmainnatan ya'tiba rizquha min kulli makanin* sebuah gambaran tentang negeri yang aman, damai, sejahtera, tapi kemudian mereka ingkar, *fakafarat bi an'umillahi* mereka ingkar atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah lalu mereka berperilaku menyimpang.

Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal haufi maka Allah menimpakan kepada mereka bencana, musibah kelaparan dan ketakutan dalam kehidupan bangsa

itu. Bahkan ada *sunnatullah* yang ditawarkan oleh Al-qur'an yang lebih keras dari itu. Ketika Allah mengatakan *faidza aradna an nublika qaryatan*, apabila Kami menghendaki sebuah negeri hancur maka Kami perintahkan orang-

orang yang berfoya-foya dan memerintahkan orang yang kaya-raya dan berkuasa itu untuk berbuat baik, ternyata mereka tidak juga mau mengikuti jalan yang baik. *Fahaqqa 'alaih qaulu*, maka berhaklah atas negeri itu adzab Allah.

Kalau itu terjadi kata Allah *fadamarnaha tadmira*, maka akan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Belum lagi Nabi yang menceritakan bagaimana kehancuran ummat-ummat yang dulu. Ummat dulu itu hancur, kata Nabi, karena apabila orang-orang yang terhormat melakukan penyimpangan dimaafkan dan apabila orang-orang kelas bawah melakukan penyimpangan ditegakkan. Demi Allah kalau Fatimah anakku melakukan penyimpangan mencuri, aku potong tangannya. Sampai Nabi mengatakan begitu. Saya menggambarkan ini untuk memberikan ilustrasi

bahwa sebetulnya kalau kita membiarkan kemungkarannya, penyimpangan-penyimpangan terus-menerus dan kita tidak melakukan upaya-upaya untuk perbaikan, maka sebetulnya kita telah membahayakan kelestarian bangsa ini. Karena bangsa dan negara Indonesiapun berada dalam wilayah *sunnatullah* ini. Tapi tetap sekali lagi bahwa pandangan-pandangan politik yang bertumpu pada pandangan-pandangan keagamaan kelompok Sunni itu memang sangat fleksibel.

Ummat Islam khususnya kalangan Sunni yang memiliki pandangan politik yang luwes, toleran, mengutamakan keutuhan bangsa, jelas telah menguntungkan negara. Tapi negara tampak tidak mengimbangi pengorbanan arus bawah itu dengan masih tegaknya sistem yang tidak Islami dan "tidak sehat" ini. Menurut Anda?

Kalau dipertanyakan bagaimana dengan kenyataan itu jawabannya tentu sangat kita sayangkan. Yang kedua, sesuatu yang kita khawatirkan, bahwa kemudian masyarakat bawah kehabisan toleransi. Karena itu saya kira sebaiknya harus ada semangat saling memberi dari kedua belah pihak. Terlalu banyak sudah yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atau penguasa, sementara pemerintah juga sudah memberikan sesuatu tetapi seperti yang *sampeyan* bilang, tidak berimbang. Sehingga jawaban strategisnya sebetulnya kita memang harus berusaha untuk menjadikan masyarakat kita ini lebih mandiri. Masyarakat mandiri yang diharapkan bisa menjadi mitra, bisa mengimbangi. Bahasa halusnya *mengimbangi* bahasa kasarnya bisa *melawan*. Bisa berkata tidak, bisa menolak. Tanpa masyarakat mandiri, hal itu tidak mungkin. Kita pernah berharap bahwa munculnya kelas menengah baru di Indonesia ini akan menjadi kelompok yang mandiri. Kelas menengah kalangan pengusaha itu baru penghasilannya yang kelas menengah, mentalitasnya tidak. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak.

Dan juga bentuk usahanya tidak mandiri,

tidak hanya mentalnya saja...

Betul. Para pengusaha, kaum profesional, artis, dan sebagian kaum intelektual ya, banyak kelompoklah yang kita harapkan mereka menjadi kelompok penyeimbang, mitra, ternyata juga tidak melakukan itu. Dalam hal ini saya kira, kalangan ulama dan pengasuh-pengasuh pesantren kita harapkan akan menjadi *pioneer* dari kemandirian itu. Kalau mereka mampu menghadirkan dan menampilkan dirinya menjadi orang-orang yang mandiri dan kemudian mampu menciptakan komunitas yang mandiri, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyejukkan bagi kelangsungan bangsa dan negara ini. Dan saya pikir pemerintah yang berpikir jernih dan berpikir kenegaraan dan masa depan bangsa, mereka akan berusaha untuk mendukung dan membantu mereka yang akan menjadi kelompok-kelompok yang mandiri. Saya kira pemerintah harus *ngalah* sedikitlah. Pemerintah harus tidak merasa cukup bahwa dia sudah bisa melakukan segala-galanya, sudah bisa menjadikan orang mengikuti kemauannya. Justru itu harus dipertanyakan. Kalau berfikir jernih dan direnungkan dengan baik, saya kira masih banyak kawan-kawan kita yang di dalam pemerintahan itu yang berpikiran negarawan. Hanya mereka masih dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Kita masih berharap sekalipun harapan itu terasa kecil. Tapi saya ingin menekankan bahwa membangun kelompok-kelompok masyarakat mandiri ini harus menjadi prioritas dari gerakan sosial-kemasyarakatan, bahkan gerakan politik di Indonesia. Sebab itu akan menguntungkan stabilitas dan perjalanan kekuasaan bangsa ini.

Dan tentu akan memberikan corak alternatif dari hubungan yang semata-mata formalitas politik seperti yang terjadi selama ini....

Ya, ya. Jadi dengan begitu, mereka yang masuk dalam lingkaran kekuasaan bisa melakukan peran-peran seperti yang kita idealkan itu. Mereka yang berada di luar juga harus berupaya menjadi manusia-manusia yang mampu menciptakan

kelompok-kelompok yang mandiri. Kiai-kiai itu, sebetulnya yang paling memenuhi syarat.

Tapi harus ada yang selalu mengingatkan. Sebab ada juga kiai yang ikut "kebulatan tekad" ini, itu, menjustifikasi penguasa...

Oh. Ya..

Adakah hal yang Anda akan sampaikan?

Saya pikir ummat Islam memiliki tugas yang sangat besar untuk memelihara agar negara dan bangsa ini tetap dapat berjalan, dapat berlanjut dan cita-cita dapat terwujud seperti yang kita inginkan. Kenapa saya katakan begitu, karena akibat dari semuanya itu yang paling merasakan adalah ummat Islam. Sehingga merekalah yang paling berkepentingan sebetulnya, untuk memelihara stabilitas dari perjalanan bangsa ini. Kita ini kan disebut sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan itu kan ummat yang adil. Dan sebagai mayoritas kita ingin memberikan pengayoman dan pemeliharaan dengan harapan bahwa mereka yang minoritas juga tidak terlalu "mempermainkan". Itu pertama. Kedua, berkaitan dengan itu saya kira kalau terjadi sebuah benturan-benturan atau perbedaan-perbedaan pendapat dengan penguasa, saya kira harus diletakkan secara benar persoalannya. Bahwa kecintaan ummat Islam kepada bangsa dan negara itu tudak bisa diragukan. Dan jangan digeneralisir antara kecintaan kepada bangsa dengan kritik kepada penguasa.

Kalau ngritik, berbeda pendapat dengan penguasa lalu dianggap tidak mencintai bangsa, itu salah besar. Mestinya kalau kita melakukan upaya mengkritik atau dalam bahasa lain, sedikit

melawan, sebetulnya karena kecintaan kepada keberadaan dan kelanjutan dari bangsa dan negara ini. Terkadang mereka yang sering mengatakan sangat mencintai bangsa lalu mendukung pemerintah mati-matian tanpa reserve, mereka sebetulnya pengkhianat. Saya berharap ini disadari oleh orang-orang penting di negeri ini. Sehingga kita lalu melihat perbedaan kita tidak mengurangi kecintaan dan kebersamaan kita dalam membawa bangsa ini. Ini penting. Karena, di kalangan penguasa sendiri kalau ada orang yang berbeda pendapat apalagi melawan, dianggap sudah tidak patriotik, tidak nasionalis. Dan yang ketiga, terakhir, saya kira ummat Islam harus memahami bahwa dekat atau menjadi bagian dari kekuasaan itu harus dimaknai secara

substansial. Kalau tidak demikian, tetapi dimaknai sekedar formalitas, apalagi hanya hubungan-hubungan pribadi yang baik, saya kira anggapan seperti itu justru akan berakibat sangat tidak baik bagi semuanya. Sehingga Hadis populer tentang hubungan al-'ulama' walumara itu tidak boleh hanya diinterpretasikan

Kalau berfikir jernih dan direnungkan dengan baik, saya kira masih banyak kawan-kawan kita yang di dalam pemerintahan itu yang berpikiran negarawan. Hanya mereka masih dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu.

bahwa ulama dan umara bekerjasama. Bukan. Ulamanya melakukan peran-peran sebagaimana yang disandang oleh keulamaannya, sedang umara melakukan peran-peran sebagaimana keharusannya sebagai umara sekalipun mereka tidak harus bersama-sama. Malah kalau mereka kolusi untuk melakukan sesuatu yang negatif, lalu apa yang bisa dibilang baik. Penafsiran yang sudah sangat umum itu harus diproporsionalkan. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi enggak substansial. Jadi mereka mengukur hadis itu hanya dengan kerjasama, resepsi bersama, bergandengan, pernyataan bersama. Ha, ha, ha... enggak bisa. Saya kira hal-hal yang penting-penting ini perlu diletakkan sejak awal. □